



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ABD QOHAR AF, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bombana, 14 Januari 2026,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI TENGGARA,

(Dr. ABD QOHAR AF, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,

(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA
TAHUN 2026**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	63%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	85%
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	82%
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	85
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	82%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp434.957.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp6.502.578.000
Jumlah		Rp6.937.535.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Bombana, 14 Januari 2026,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI TENGGARA,

(Dr. ABDUQOHAR AF, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,

(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AAN RIYANTO LATAMA, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,



(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(AAN RIYANTO LATAMA, S.H., M.Kn.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan	Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum	84%
		Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum	3,7

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	83%
3	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp1.853.000
2	Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp989.000
3	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp2.769.000
4	Layanan Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp2.037.000
5	Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp31.446.000
Jumlah		Rp39.094.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,



(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)

(AAN RIYANTO LATAMA, S.H., M.Kn.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : THREE PUTRI AYU, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,



(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)

(THREE PUTRI AYU, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	81%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi	89%
2	Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	63%
3	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	86%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
5	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp2.840.000
2	Layanan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp110.298.000
3	Layanan Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp1.878.000
4	Layanan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp1.146.000
Jumlah		Rp116.162.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(LANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)



(THREE PUTRI AYU, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISMAN MUNAWIR ZAINI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)

(RISMAN MUNAWIR ZAINI, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	63%
2	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	78%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	perpajakan, tindak pidana kepabeanaan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	52%
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	76%
3	Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	28%
		Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanaan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)	36%
4	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>	86%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
6	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori A	Rp5.536.000

2	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori A	Rp22.139.000
3	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap	Rp54.999.000
4	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah 3A Satker jauh dari LP dengan transportasi darat	Rp4.199.000
Jumlah		Rp86.873.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)

(RISMAN MUNAWIR ZAINI, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUSIANDRA GLEVIERTH LUBIS, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,



(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(JUSIANDRA GLEVIERTH LUBIS, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	100%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	3,7

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Jaksa Pengacara Negara		
3	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
		Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
4	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	81%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	3,7
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
7	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Pengelolaan HALO JPN Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp1.091.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp1.350.000
3	Layanan Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp5.043.000
4	Layanan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan	Rp6.515.000

5	Layanan Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp424.000
Jumlah		Rp 14.423.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,

(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(JUSIANDRA GLEVIERTH LUBIS, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : APRILLIA ZULKARNAEN, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,



(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(APRILLIA ZULKARNAEN, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	91%
		Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	91%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	91%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan	4,1
		Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara	4,1
		Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi	4,1

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan	Rp70.000.000
2	Pemusnahan	Rp48.000.000
3	Penyelesaian	Rp 25.845.000
4	Pengiriman Barang Bukti Dan Tilang Gratis ke Masyarakat	Rp 34.560.000
Jumlah		Rp178.405.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,



(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(APRILLIA ZULKARNAEN, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARMIN A, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

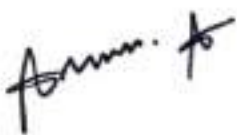
Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,

(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(ARMIN A, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Bombana	73
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Bombana	90,25
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Bombana	3,7
5	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	65%
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Bombana	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Gaji dan Tunjangan	Rp 5.059.216.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.443.362.000
Jumlah		Rp 6.502.578.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,

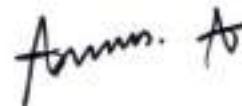
Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H.)



(ARMIN A, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUHARDIMAN, S.H.
Jabatan : KEPALA URUSAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARMIN A, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(ARMIN A, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA URUSAN TATA USAHA
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
DAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK,

(SUHARDIMAN, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA URUSAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEJAKSAAN NEGERI
BOMBANA TAHUN 2026**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI	Persentase layanan umum kepegawaian sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan pengembangan kepegawaian sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan kepangkatan dan mutasi kepegawaian sesuai SLA	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		(Service Level Agreement)	
		Persentase layanan pemberhentian dan pensiun sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
2	Berkurangnya pengaduan Masyarakat terhadap SDM Kejaksaan RI	Persentase SDM Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin	4%
3	Meningkatnya kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI	Persentase layanan perbendaharaan sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan pendapatan dan piutang negara sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran PNBPN sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan umum keuangan sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kejaksaan RI	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kejaksaan RI	
5	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas Perencanaan dan penggunaan anggaran Kejaksaan UKE I Kejaksaan RI	NKA Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	90,25
6	Meningkatnya kegiatan perencanaan yang meliputi pengelolaan data, penyusunan rencana anggaran dan program kerja, pemantauan dan evaluasi, pengembangan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI	Persentase layanan pengelolaan data sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan penyusunan rencana anggaran dan program kerja sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan pemantauan dan evaluasi sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan organisasi	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		dan tata laksana sesuai SLA (Service Level Agreement)	
		Persentase layanan reformasi birokrasi sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase satker Kejaksaan RI yang mendapat pendampingan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	40%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satker Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	73
8	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Organisasi UKE I Kejaksaan yang tepat fungsi	Persentase implementasi RB UKE I berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik	85%
9	Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
10	Meningkatnya kualitas ASN Kejaksaan yang berakhlak	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen ASN	3,7
11	Meningkatnya kualitas layanan keuangan di lingkungan Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan keuangan	3,7
12	Meningkatnya kualitas layanan umum di lingkungan Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Sub Bagian umum	3,7
13	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen di lingkungan Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan dukungan manajemen Satker UKE I	3,7
14	Meningkatnya kualitas layanan publik Kejaksaan RI	Persentase satker yang melaksanakan survey kepuasan layanan publik	100%
		Indeks kepuasan layanan publik Kejaksaan RI	3,7

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembayaran gaji dan tunjangan	Rp5.059.216.000
2	Langganan Daya Dan Jasa	Rp213.600.000

3	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Perkantoran	Rp164.124.000
4	Pembinaan Mental Dan Jasmani	Rp30.000.000
Jumlah		Rp5.466.940.000

D. PRIORITAS NASIONAL

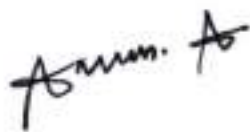
-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(ARMIN A, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA URUSAN TATA USAHA
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK,



(SUHARDIMAN, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEPRIANUS KILY KILY
Jabatan : KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK
KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARMIN A, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(ARMIN A, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN,
DATA STATISTIK KRIMINAL DAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PERPUSTAKAAN,

(SEPRIANUS KILY KILY)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PERPUSTAKAAN KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kegiatan analisis kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kejaksaan RI	Persentase jumlah satuan kerja yang telah melaksanakan inventarisasi barang milik negara	40%
		Persentase layanan analisis kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan pengadaan sesuai SLA (Service Level	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Agreement	
		Persentase layanan pengelolaan barang milik negara sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
2	Meningkatnya kegiatan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi	Persentase layanan pengelolaan data dan statistik kriminal	100%
		Persentase layanan penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
3	Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase layanan pemeliharaan dan implementasi sistem informasi pada seluruh satker Kejaksaan RI sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan manajemen Barang Milik Negara dan pengadaan di Lingkungan Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan	3,6
5	Meningkatnya jumlah gedung kantor, rumah negara, kendaraan jabatan, operasional, dan fungsional, perangkat pengolah data dan komunikasi, perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai	Persentase gedung kantor yang direhabilitasi	60%
		Persentase rumah negara yang direhabilitasi	60%
		Persentase pembangunan gedung kantor satuan kerja yang baru	40%
		Persentase pembangunan rumah negara baru	10%
		Persentase pengadaan mobil jabatan dan operasional	60%
		Persentase pengadaan mobil tahanan dan mobil fungsional lainnya	60%
		Persentase pengadaan sepeda motor dinas	60%
		Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	60%
		Persentase pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran	75%
		Persentase terpenuhi sarana/prasarana intelijen dan	75%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		penegakan hukum	

No	Kegiatan	Anggaran
1	Keperluan sehari hari perkantoran	Rp941.400.000
2	Pemeliharaan Kantor	Rp74.238.000
3	Layanan Internet	Rp20.000.000
	Jumlah	Rp1.035.638.000

D. PRIORITAS NASIONAL

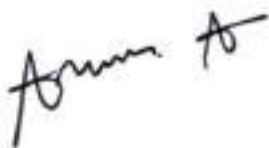
-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(ARMIN A, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN,
DATA STATISTIK KRIMINAL DAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PERPUSTAKAAN,



(SEPRIANUS KILY KILY)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL PRATIWI, S.H.
Jabatan : KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR
BIASA DAN EKSEKUSI : SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RISMAN MUNAWIR ZAINI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS,

Pihak Pertama,
KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN,
UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN
EKSEKUSI : SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

(RISMAN MUNAWIR ZAINI, S.H., M.H.)

(NURUL PRATIWI, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI : SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipikor dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	91%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipidsus (Perpajakan) dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	91%
3	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipidsus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	91%
4	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	91%
5	Meningkatnya penyelesaian pengendalian operasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat penyelesaian kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.	91%
6	Meningkatnya penyelesaian pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat penyelesaian perkara tipikor dan TPPU yang berdampak pada pengembalian kerugian negara	91%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp48.224.000
	Jumlah	Rp48.224.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS,

Pihak Pertama,
KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN,
UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN
EKSEKUSI : SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



(RISMAN MUNAWIR ZAINI, S.H., M.H.)



(NURUL PRATIWI, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI LAILA FITRI AHDIANI AS, S.H.
Jabatan : KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN : SEKSI TINDAK
PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : THREE PUTRI AYU, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(THREE PUTRI AYU, S.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA SUB SEKSI PRA
PENUNTUTAN : SEKSI TINDAK
PIDANA UMUM,

(ANDI LAILA FITRI AHDIANI AS, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN : SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang A (Bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A yang diproses hingga Pra-Penuntutan	91%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	pencucian uang)		
2	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang B (Bidang bidang tindak pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B yang diproses hingga Pra-Penuntutan	91%
3	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang diproses hingga Pra-Penuntutan	91%
4	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang D (Bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang diproses hingga Pra-Penuntutan	91%
5	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang E (Bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang diproses hingga Pra-Penuntutan	91%
6	Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara	Tingkat penyelesaian pelaporan pelaksanaan penanganan perkara secara akuntabel	91%
7	Meningkatnya efektivitas kolaborasi penanganan perkara lintas sektor (APH)	Tingkat penyelesaian perkara pidana umum yang berasal PPNS	81%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
8	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra Penuntutan	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan	Rp2.840.000
Jumlah		Rp2.840.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,



(THREE PUTRI AYU, S.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA SUB SEKSI PRA
PENUNTUTAN : SEKSI TINDAK
PIDANA UMUM,



(ANDI LAILA FITRI AHDIANI AS, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RESTU SYLVIA MARDAYANTI, S.H.
Jabatan : KEPALA SUB SEKSI I : SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AAN RIYANTO LATAMA, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(AAN RIYANTO LATAMA, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,
KEPALA SUB SEKSI I : SEKSI
INTELIJEN,

(RESTU SYLVIA MARDAYANTI, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB SEKSI I : SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan	Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum	84%
		Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum	3,7
2	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	83%
3	Meningkatnya efektivitas	Tingkat utilisasi sarana dan	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1		
2		

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Bombana, Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI INTELIJEN,



(AAN RIYANTO LATAMA, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,
KEPALA SUB SEKSI I : SEKSI
INTELIJEN,



(RESTU SYLVIA MARDAYANTI, S.H.)